

REFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF INVESTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT

PUBLIC POLICY REFORMATION THROUGH PERSPECTIVE OF INVESTMENT ON DEVELOPMENT IN WEST JAVA

Tati Sarihati

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Akselerasi pembangunan, baik lokal maupun nasional seringkali dihadapkan pada keterbatasan berbagai sumber terutama kemampuan finansial pemerintah maupun swasta nasional. Fenomena ini merupakan suatu realitas dan tantangan bagi pemerintah sebagai penyedia layanan publik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan derasnya pengaruh globalisasi teknologi informasi, pembangunan ekonomi dan politik serta pesatnya pertumbuhan pembangunan di negara-negara maju dan berkembang. Penampilan pemerintahan birokratis serta kebijakan publik yang rigid dengan kontennya yang sarat dengan akumulasi kepentingan politik sektoral maupun departemental menjadi sorotan dan kritik publik yang mengemuka saat ini, terutama untuk menumbuhkan minat investasi bagi investor dalam maupun luar negeri. Pada tulisan ini diungkap dan dideskripsikan mengenai urgensi reformasi kebijakan publik tingkat lokal serta faktor-faktor yang mempengaruhi investasi serta upaya membangun social capital dalam meningkatkan equity, social cohesive, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: Reformasi Kebijakan Publik, Investasi dan Pembangunan.

ABSTRACT

Acceleration of development, both regional and national, is often faced with the limitations of various sources, especially the financial capacity of government and private sectors. This phenomenon is a reality and a challenge for the government as a provider of public services to reach equitable development and community welfare, in line with the swift influence of globalization of information technology, economic and political development and the rapid growth of development in developed and developing countries. The reputation of a bureaucratic government and rigid public policies filled both with accumulated departmental and sectoral political interests are currently in the spotlight of public criticism, especially when it should foster investment interest for domestic and foreign investors. This paper reveals and describes the urgency of local level public policy reformation and the factors that influence investment and efforts to build social capital in increasing equity, social cohesiveness, and community participation to support sustainable development in West Java.

Keywords: Public Policy Reform, Investment and Development.

1. Pendahuluan

Transformasi model pembangunan dan akselerasinya merupakan realita yang direspon menjadi sebuah tantangan dalam upaya pemenuhan tuntutan masyarakat bangsa (*civil society*) yang bergerak dinamis. Eksistensi kehadiran negara ditengah rakyatnya dirasakan nyata diantaranya apabila proses pembangunan berjalan progrefif dan mampu mengubah yang konservatif menjadi bermanfaat bagi rakyat.

Pesatnya pembangunan dan modernisasi di negara berkembang khususnya di Asia dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu eksternal yang begitu deras dan tidak jarang menjadi pembeding serta pertanyaan yang tak terjawab, walaupun Indonesia tidak juga bisa dikatakan sebagai negara terbelakang, tetapi dalam beberapa hal masih banyak tertinggal apabila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga terdekat. Indonesia begitu kaya dengan sumberdaya alam dan ini tidaklah dimiliki negara lain, sehingga sangatlah wajar apabila mata dunia menilik kekayaan potensi-potensi kebanggaan bangsa yang tidak terhingga sebagai peluang aset produksi ekonomi.

Pemerintah Indonesia saat ini yang mengedepankan kerja nyata telah membuka lebar-lebar melalui kebijakan nasional untuk menarik minat negara lain berinvestasi dalam berbagai bidang baik dalam pembangunan infrastruktur maupun potensi bisnis dalam negeri lainnya. Upaya pemerintah tersebut diimbangi dengan evaluasi kebijakan publik melalui identifikasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan investasi, selain berupaya meyakinkan investor melalui penciptaan stabilitas

politik yang menjamin amannya berinvestasi di Indonesia.

Evaluasi kebijakan pada kenyataannya tidaklah cukup dilakukan apabila hanya melahirkan kebijakan yang kurang signifikan untuk menarik investasi, karena dengan model kebijakan *incremental* hanya memuat perubahan yang sedikit dan ini tentunya kurang efektif untuk akselerasi pencapaian tujuan tersebut. Pada konteks ini pemerintah memandang perlunya reformasi kebijakan publik untuk memangkas prosedur birokratis dibidang perijinan yang berkaitan dengan investasi, sehingga mampu menjadi magnet bagi investor asing menanamkan modalnya untuk proyek-proyek pembangunan berskala besar dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan tersebut cukup realitis mengingat pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain yang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam paket kebijakan perbaikan iklim investasi. selain itu sejumlah pertemuan bilateral maupun multilateral dan serangkaian promosi ke berbagai negara investor. Sejalan dengan dinamika reformasi paket kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka sikap responsif pemerintah daerah untuk membuka peluang-peluang investasi pada objek dan potensi daerah yang dimilikinya menjadi terbuka dalam memecahkan sejumlah permasalahan baru dan laten yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, bahkan untuk memetakan permasalahannya juga cukup sulit.

Jawa Barat merupakan provinsi tujuan investasi di Indonesia, bersama

Jakarta dan Jawa Timur. Pada konteks investasi di Jawa Barat sebagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan BPMPT Provinsi Jawa Barat bertambah menjadi 261 jenis perizinan, terdiri dari izin sebanyak 148 jenis izin dan 113 jenis non izin, yang sebelumnya berjumlah 205 jenis perizinan. Baik besaran investasi, jumlah tenaga kerja, maupun jumlah proyek berkembang dan menyebar tidak hanya ke beberapa daerah saja akan tetapi ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat

Kendala Perijinan Usaha di Jawa Barat

- Pelayanan perijinan usaha masih kental dengan praktek birokrasi yang menghambat kegiatan usaha. Laporan Doing Business 2017 menyatakan untuk memulai usaha di Indonesia harus melalui 11 prosedur dengan lama waktu 24,9 hari dan membutuhkan biaya sebesar 19,4% dari pendapatan perkapita masyarakat (World Bank, 2016)
- Kondisi Perijinan Usaha di Jawa Barat versi KPPOD
- Biaya perijinan di Jawa Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (2 juta berbanding 744 ribu)
- Lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perijinan di Jawa Barat mendekati 40 hari (rata-rata nasional adalah selama 14 hari)
- Skor perijinan usaha di Jawa Barat sebesar 75,39 sedikit lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 74,73.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Reformasi Birokrasi

Riyadi (2008) menjelaskan bahwa birokrasi merupakan salah satu unsur

administrasi negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti regulasi, perijinan, pelayanan publik dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Peran, fungsi dan otoritas yang dimiliki inilah yang menjadikan birokrasi sebagai organisasi yang sangat strategis. Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkup pekerjaannya, serta kewenangan yang dimilikinya birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis.

Birokrasi menguasai kewenangan terhadap akses-akses seperti sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan posisi, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga untuk memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, birokrasi dengan aparturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis terspesialisasi yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak diluar birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-lain.

Dalam konteks policy making process, birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting pada semua tahapan mulai dari tahap perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan

turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan.

Peran birokrasi dengan fungsi administrasi negara dilakukan oleh birokrasi. Jadi birokrasi diartikan sebagai keseluruhan lembaga pemerintahan negara, yang meliputi aparatur kenegaraan, aparatur pemerintahan, serta sumber daya manusia birokrasi yang terdiri atas pejabat negara dan pegawai negeri. Birokrasi secara leksikal berarti alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

Secara umum, pembangunan birokrasi mencakup berbagai aktivitas terencana yang berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Adi Suryanto, 2012). Pembangunan birokrasi yang bersih dan bebas KKN menyangkut seluruh sendi birokrasi, bukan hanya PNS/birokrat, namun meliputi pembangunan struktur, sistem, business process, dan karakter/etika moral. Secara terencana pembangunan Birokrasi pun dilakukan melalui sebuah proses multidimensi yang disebut Reformasi Birokrasi. Secara khusus Presiden telah menetapkan

Perpres No.81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Upaya penataan pembangunan birokrasi yang komprehensif seperti inilah yang secara substansi oleh Sofian Effendi (2010) disebut juga sebagai reformasi birokrasi. Konsep tentang reformasi birokrasi ini seringkali diperhadapkan *visa-vis* dengan konsep tentang reformasi administrasi. Namun, reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan bagian dari reformasi administrasi negara (Caiden dalam Efendi, 2006, Riyadi, 2008). Dalam pengertian yang luas, Wallis (1989) mengemukakan bahwa “Administrative reform means an induced, permanent improvement in administration” (Wallis 1989, 170). Sayangnya, permanent improvement sebagaimana yang diinginkan melalui upaya reformasi ini dalam kenyataannya sering menghadapi ironi.

Gerald Caiden dalam Effendi (2010) mengungkapkan reformasi sistem administrasi tidak pernah mencapai inti permasalahan tetapi hanya formalitas semata. Reformasi tersebut tidak cukup luas dan mendalam. Bahkan cukup Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 29 banyak negara yang tidak memberikan perhatian yang cukup memadai pada reformasi administrasi.

Dinamika Reformasi Birokrasi Terkait dengan dinamika reformasi administrasi negara, di Indonesia reformasi birokrasi pemerintah merupakan bagian dari tuntutan reformasi secara total yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum (Riyadi, 2008).

Riyadi mengutip pendapat Tjokroamidjojo (2001) yang

mendefinisikan reformasi sebagai berikut: “reformasi dari suatu sistem dan budaya politik yang paternalistik, otokratik, monolitik dan sentralistik dengan regimentasi terlalu kuat dan KKN, ke arah suatu sistem dan budaya politik yang lebih terbuka, demokratis, egaliter dan toleran, dimana pemeran utama ekonomi adalah masyarakat dalam sistem pasar yang lebih fair” Dengan merujuk pada Buku Putih Reformasi Administrasi Negara yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara (2010), dinamika reformasi administrasi negara memiliki 4 (empat) dimensi penting, yaitu: (1) Kelembagaan: desentralisasi, penataan organisasi dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat; (2) Ketatalaksanaan: Akuntabilitas, Transparansi, Penegakan hukum, Orientasi pasar, Pelayanan berorientasi publik, dan E-Government; (3) Sumberdaya Aparatur: Paradigma manajemen SDM, dan manajemen kepegawaian daerah; dan (4) Pola hubungan birokrasi dengan lingkungan politik, ekonomi, masyarakat sipil dan masyarakat Internasional.

2.2. Problematika Reformasi Birokrasi

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mencatat setidaknya ada 7 poin penting dari kritik tersebut, yaitu: (1) Buruknya pelayanan publik; (2) Besarnya angka kebocoran anggaran negara; (3) Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS; (4) Sulitnya pelaksanaan koordinasi antarinstansi; (5) Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antarinstansi, Laporan Akhir 30 Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan

aktual, dan masalah-masalah lainnya; (6) Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi; dan (7) Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan.

Kritik yang dikemukakan MTI tersebut dalam konteks konseptual biasa disebut sebagai patologi birokrasi untuk mendeskripsikan bagaimana birokrasi telah memiliki penyakit yang menjadikannya tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Adi Suryanto (2012) mengemukakan berbagai bentuk patologi birokrasi yang telah terjadi selama ini, sangat mempengaruhi efektivitas birokrasi dalam melaksanakan berbagai fungsinya. Sebut saja kualitas pelayanan publik yang rendah, timbulnya praktek KKN, inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, kapasitas kinerja pemerintah yang kurang, aparatur yang tidak profesional, dan sederet citra buruk birokrasi di Indonesia lainnya.

Sedangkan Makmur (2009) melihat patologi birokrasi didorong karena adanya dekadensi moral terkait dengan berbagai bentuk tindakan persekongkolan (konspirasi) seperti persekongkolan jabatan, persekongkolan pekerjaan, persekongkolan status, persekongkolan kolega, persekongkolan keluarga, dan persekongkolan pertemanan. Dalam konteks seperti inilah reformasi birokrasi harus diletakkan.

Irfan Islamy (1997) mengemukakan bahwa upaya untuk

mereformasi birokrasi merupakan sebuah agenda publik yang tidak terelakkan. Dalam tataran konseptual, idealnya, sebuah reformasi birokrasi diarahkan untuk mengakomodasi sejumlah karakter dasar dari Birokrasi, yakni:

1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani-termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat.
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni: pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya dan ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan.
5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku-rigid-menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif. Namun, upaya untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut tidak mudah dan bersifat kompleks karena

harus menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan.

Dalam perspektif politik, Siti Zuhro (2012) mengemukakan bahwa tantangan pembangunan sistem dan standar kerja birokrasi yang profesional berasal baik dari lingkungan internal dan eksternal birokrasi. Dilihat dari lingkungan internal, terdapat dua hambatan utama. Pertama, budaya birokrasi. Budaya itu terwujud dalam perilaku yang korup dan tidak berorientasi pada pelayanan. Kedua, di Indonesia kelompok birokrat sudah lama menjadi kelompok kepentingan ekonomi. Implikasi dari tantangan internal ini menjadikan sistem dan standar kerja birokrasi yang profesional yang coba dibangun menjadi tidak mudah.

Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan tersebut terutama berasal dari politisi dan partai politik. Bagi mereka birokrasi dipandang sebagai sarana untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan. Di era Orde Baru, misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) dan birokrasi telah dijadikan sebagai mesin politik. Birokrasi yang mestinya bekerja secara efisien dan efektif dalam melayani dan mewujudkan kesejahteraan rakyat berubah menjadi semacam kekuatan politik yang mengejar target partai dan rezim yang berkuasa.

Tujuan pemerintahan negara tidak dapat dipisahkan dari pembangunan yang dirancang sebagai dimensi penting dalam merancang setiap kebijakan pemerintah. Pembangunan yang dirancang tersebut setidaknya bukan hanya menonjolkan keberhasilan ekonomi sebagai faktor yang dominan tetapi juga memasukkan faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Faktor-faktor yang mendukung tersebut

berupa perbaikan pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Proses pembangunan yang dijalankan bukan hanya dilihat dari segi fisik (*physical result*) tetapi juga harus membawa sejumlah perubahan (*growth with change*) yang sifatnya non material. Setidaknya ada 3 perubahan yang perlu terjadi dalam proses pembangunan, yaitu perubahan struktur ekonomi (misalnya dari pertanian kepada industry lalu ke bidang jasa), perubahan kelembagaan (misalnya reformasi birokrasi dan SDM), dan perubahan kenaikan pendapatan perkapita (GNP riil dibagi jumlah penduduk).

Indikator kunci yang dimaksud di atas adalah indikator ekonomi dan indikator sosial. Beberapa variabel yang masuk dalam indikator ekonomi antara lain GNP perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dalam indikator social antara lain *Human Development Index* dan (*Physical Quality Life Index*) Indeks Mutu hidup Bahkan indicator-indikator ini digunakan sebagai acuan terhadap pengelompokan Negara tersebut dalam kaitannya dengan sistem ekonomi global Namun kenyataan yang terjadi tidak bisa disederhanakan dengan hanya mengandalkan kedua indikator tersebut, sebab sebenarnya proses pembangunan yang berjalan bersifat kompleks.

Pertumbuhan (pembangunan) semata tidak banyak menyelesaikan persoalan dan kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan. Bahkan Todaro mengatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam

struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolut (Bryant,1989). Dapat dimengerti bahwa pembangunan bukanlah konsep statis melainkan dinamis dan merupakan proses tiada akhir.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa konsep ekonomi kita berbeda dengan negara lain di dunia. Kita mengenal adanya sistem ekonomi Pancasila, sebagian lagi memasukkan istilah ekonomi kerakyatan. Namun semua itu pada prinsipnya bermuara pada kepentingan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada beberapa karakteristik dari ekonomi Pancasila atau pun kerakyatan tersebut yang diberikan oleh penggagasnya. Dengan mengutip pendapat Mubyarto bahwa ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, social dan moral, kehendak kuat untuk pemerataan, nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi, koperasi merupakan sokoguru, dan imbalan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi (Kuncoro,1997).

3. Metode Yang digunakan

Kajian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan kondisi nyata yang terjadi pada objek yang dikaji dengan menggunakan teknik penelitian observasi dan analisis dokumen serta studi kepustakaan.(Nasution,2008).

4. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan, permasalahan pokok terpenting berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan investasi adalah peran dan fungsi birokrasi pemerintah daerah Jawa Barat, karena hal ini memiliki pengaruh kuat dalam menentukan iklim dan budaya kerja yang sangat bersentuhan dengan dimensi-dimensi internal maupun eksternal. Dalam lingkungan eksternal masyarakat dan pelaku usaha merupakan pihak yang merasakan langsung tingkah laku dan kebijakan birokrasi. Sebab bangunan lembaga birokrasi terdiri dari SDM, wewenang dan tanggung jawab, serta struktur dan budaya kerja tersendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Toha (2002) bahwa Lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandung nilai (*values*), sistem, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya. Oleh karena itu reformasi kelembagaan birokrasi meliputi reformasi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, serta reformasi tata nilai, tata sistem, dan tata perilaku dari sumber daya manusianya.

Bila dikaitkan dengan konteks ekonomi, maka sudah sewajarnya bila reformasi birokrasi perlu dilakukan, karena tidak bisa lagi bertumpu pada sistem dan budaya kerja yang lamban, tidak responsif, tertutup atau 'tabu' terhadap persaingan, dan pemikiran yang tradisionalistik. Juga tidak bisa lagi menutup mata bahwa pemerintah daerah berada dalam persaingan yang serba cepat dan membutuhkan peningkatan

kemampuan dan perubahan strategi yang baru. Pemerintah perlu berpikir cerdas dan terbuka terhadap perubahan. Osborne dan Gabler dalam bukunya mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan yang berkembang selama era industri, dengan birokrasi yang lamban dan terpusat, pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan, serta rantai komando, tidak lagi berjalan dengan baik. Oleh karena itu memerlukan fleksibilitas, perubahan yang cepat, responsivitas terhadap pelanggan, dan pengarahannya yang ekstensif kepada pelanggan.

Osborne dan Gaebler juga menyarankan paradigma birokrasi yang baru antara lain: (a) *Catalytic government: steering rather than rowing*. Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri; (b) *Community-owned government: empowering rather than serving*. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah; (c) *Competitive government: injecting competition into service delivery*. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan

birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik.

Beberapa hal penting lain terkait upaya menarik minat investasi pembangunan di Jawa Barat sejalan dengan dinamika reformasi birokrasi daerah adalah pelunya penyederhanaan proses pengajuan perizinan yang dirasakan masih rumit meski pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah terobosan-terobosan melalui legislasi daerah baik pada level provinsi maupun Kabupaten/Kota. Upaya ini bertujuan agar sejumlah regulasi dan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah provinsi Jawa Barat dapat menjamin proses pemberian izin baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota cepat, sederhana dan murah.

Dari hasil pengamatan pada Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditemukan berbagai hal seperti prosedur perizinan yang kompleks yang menghambat pendirian, formalisasi, dan ekspansi perusahaan baru. Bertele-telanya prosedur birokratik menyebabkan hampir 80 sektor swasta dalam negeri masih bersifat informal dan tak terdaftar. Dari kondisi tersebut, maka reformasi perizinan sangat penting karena dapat memicu perkembangan usaha dengancepat. Namun berdasarkan hasil pengamatan masih menunjukkan sebagian besar pusat pelayanan perizinan terpadu di Kota/Kabupaten belum mencapai potensi maksimal, karena banyak pelayanan terpadu belum memangkas waktu maupun mengurangi persyaratan-persyaratan perijinan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka strategi yang dilakukan

pemerintah provinsi Jawa Barat yaitu melakukan evaluasi kebijakan untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan baik bagi masyarakat maupun para peminat investasi di daerah, walaupun penyelenggaraannya sudah dilakukan dengan system Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kebijakan reformasi untuk menarik investasi khususnya pada sektor perijinan tentu memiliki dampak pada sektor pembangunan ekonomi yang tidak bisa terlepas dari dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif dengan investasi dibidang pembangunan adalah : (1) Pembangunan melalui investasi dapat berjalan lebih cepat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; (2) Menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat; (3) Tersedianya lapangan kerja baru memiliki efek langsung terhadap tingkat pendapatan daerah; (4) Perubahan struktur ekonomi ekonomi industry sehingga kegiatan ekonomi dilakukan oleh Negara/pemerintah akan semakin beragam dan dinamis; (5) Menuntut peningkatan kualitas sumberdaya manusia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (6) Terjadi keragaman kegiatan proyek pembangunan ekonomi yang datang dari berbagai Negara investor.

Selanjutnya beberapa dampak negative diantaranya :(1) Pembanguana ekonomi melalui investasi yang tidak direncanakan dengan baik akan menimbulkan kerusakan ekosistem dan lingkungan: (2) Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan industri akan mempersempit lahan pertanian dan masyarakat menjadi terpinggirkan; (3)

Mempersempit atau bahkan menghilangkan habitat alam hayati maupun hewani; (4) Mempertinggi kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan prediksi tersebut, maka formulasi kebijakan dalam kerangka reformasi kebijakan publik yang berkaitan dengan investasi pembangunan harus mempertimbangkan secara komprehensif dan holistic aspek dan dimensi dampak pembangunan, sehingga kemungkinan yang dapat terjadi dapat dideteksi dan diminimalisir. Agar investasi yang masuk bersifat inklusif (mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan) maka seharusnya peningkatan investasi harus bisa mendorong peningkatan kesempatan kerja, Pengurangan ketimpangan daerah, Pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat serta pengurangan kemiskinan

5. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat dikemukakan dari kajian ini adalah :

1. Reformasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat hingga Kabupaten/Kota tidak hanya mengutamakan aspek pemangkasan prosedur perijinan, tetapi pada konten kebijakan yang diformulasikan dimuat dengan sanksi, kepastian penyelesaian perijinan dengan memperhatikan pula syarat-syarat yang tegas bagi pemegang ijin menyangkut ketegasan pemerintah untuk mencabut perijinan apabila

terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

2. Reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan bagian terpenting dan harus sejalan dengan reformasi kebijakan publik, sehingga dimensi-dimensi pendukung pada birokrasi dan kemampuan kerjanya bersinergi dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan.
3. Optimalisasi pengendalian pemerintah provinsi terhadap Kabupaten/Kota merupakan bagian terpenting, sehingga kendala-kendala dan pelanggaran dapat diminimalisir sebagai komitmen politis administratif penyelenggara pemerintahan dan pembangunan.
4. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari transformasi pembangunan dalam skala lokal merupakan prioritas yang tidak bisa dinafikan untuk diantisipasi sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat tidak tergeser dan bahkan termarginalisasi dinamika pembangunan ekonomi industri dan kapitalisasi asing, tetapi pembangunan melalui investasi harus mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

PUSTAKA

- Bryant, Coralie dan Louise G. White; 1989, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang (diterjemahkan oleh Rusyanto L), Jakarta, LP3ES.
- Effendi, Sofian. 2010. Reformasi Tata Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk

- Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Jhingan, M.L.; 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (diterjemahkan oleh D. Guritno), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad; 2000, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Osborne, David and Ted Gabler; 1996, *Reinventing Government* (Mewirauahakan Birokrasi), diterjemahkan oleh Abdul Rosyid, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*. Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Riyadi. 2008. Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Perilaku Administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. V, No.1, Maret 2008. pp. 100 – 108.
- Suryana; 2000, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Soebhan, Syafuan Rozi; 2000, *Model Reformasi Birokrasi Indonesia*, Jakarta, LIPI.
- Tambunan, Tulus; 2006, *Iklm Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*, KADIN Indonesia – Jetro.
- Toha, Miftah; Reformasi Birokrasi Indonesia, disampaikan dalam Seminar Good Governance di Bappenas, tgl 24 Oktober 2002.
- Nasution, 2008, *Metode Penelitian Survey*; : Bandung: Alfabeta